

Title : Nusantara sebagai Jeratan Negara ke-3 oleh Imperialisme

Author(s) : Beilla Ayu

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Opinion

Topics : History, Philosophy

Nusantara sebagai jeratan negara ke-3 oleh imperialisme

Perhatian!

Kembali lagi ini hanya tulisan opini tidak menyindir pihak manapun. Namun, tulisan ini akan menunjukkan sebuah realita tanpa provokasi dari media manapun. Bahkan tulisan ini bukan berdasarkan pemikiran negatif melainkan sebuah fakta.

Pendahuluan

Indonesia dengan penduduk 269 juta jiwa, dengan jumlah terbesar ke 4 di dunia. Luas wilayah mulai Dari sabang sampai merauke. Dari nias sampai pulau rote. Terbentang luas seluas 1,905 juta km persegi. Dan masuk dalam daftar negara luas di dunia. Didalamnya terdapat sumber daya alam yang melimpah. Tanah yang subur dengan penuh kandungan di dalamnya, mulai dari batu bara, uranium sampai dengan emas. Di bentang lautan yang luas, terdapat keindahan alam bawah laut bak surga dunia, ikan yang melimpah dan kandungan minyak bumi.

Dengan sumber daya yang melimpah dan jumlah sumber daya manusianya. Indonesia seharusnya sudah memiliki syarat untuk menjadi negara yang maju dan rakyatnya sejahtera. Namun nestapa bagi rakyat idonesia, ketimpanganlah kenyataannya. Sumber daya melimpah di kuasai modal segelintir orang. Mayoritas rakyat dihadapkan kemiskinan hasil dari penghisapan terus menerus oleh modal oligarki untuk kekayaan segelintir orang

Topik Pembicaraan

➤ **Ketimpangan kekayaan dan monopoli tanah melahirkan jurang kemiskinan bagi rakyat**

penguasaan sumber produksi oleh segelintir orang menjadi penghisapan yang dalam bagi rakyat mayoritas di indonesia. Hasilnya ialah Ketimpangan semakin mendalam. Data infid menyebutkan jumlah kekayaan 4 orang terkaya di indonesia sama dengan jumlah penghasilan 100 juta penduduk miskin di indonesia. Dan secara keseluruhan, 45% persen kekayaan nasional dikuasai oleh 1% penduduk kaya di indonesia. Ketimpangan itu sangat tajam dan tak menunjukkan pemulihannya, namun sebaliknya ketimpangan hasil dari penghisapan minoritas pemilik modal semakin dalam. Dan terbukti dari 50% penduduk di indonesia terus mengalami penurunan pendapatan setiap tahunnya sebesar 1%. Hasilnya ialah si kaya terus menjadi kaya dan si miskin tetap miskin dan semakin miskin.

Sekali lagi, Lahirnya si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin bukanlah lahir secara alamiah. Namun kenyataan tersebut imbas dari penguasaan sumber produksi oleh segelintir orang dengan pemerintah sebagai kepanjang tangan legitimasi terhadap penghisapan. Hal tersebut membuat jurang kemerosotan bagi rakyat miskin di indonesia. Ketika kaum tani semakin merosot penghidupannya di desa, tanahnya tak menghidupi. Dari 25 juta keluarga tani, mayoritasnya sebesar 14 juta kaum tani terhimpit dalam kepemilikan tanah dibawah 0,5h dan 5 juta menjadi buruh tani. Kemiskinan tersebutlah yang menjadi kemerosotan bagi kaum tani di desa, dan dengan memilih jalan penghidupan di kota sebagai buruh dengan upah murah. Pekerja seks komersial sebagai keterpaksaan dan menjadi TKI dengan berbagai ancaman di luar negeri

Dibalik kemerosotan rakyat di desa imbas dari kepemilikan tanah yang tak menghidupi. Penguasa menciptakan kemudahan terhadap penguasaan tanah sebagai sumber produksi bahan mentah. Rezim memberika kebijakan reforma agraria palsu yang meng-ilusi kaum tani dengan sebatas sertifikasi. Mengapa palsu, karena sesungguhnya tidak menghancurkan monopoli tanah yang dilakukan oleh korporasi perkebunan, pertambangan dll. Hasil dari itu terciptalah eksploitasi secara besar-besaran

terhadap sumber agraria. Sumber migas dikuasai kapital global, pertambangan batubara, emas dll dikuasai oleh oligarki (sekelompok orang). Dan tanah yang subur di Indonesia yang terbentang luas, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun monopoli lah yang tercipta. Konsesi pertambangan dan perkebunan yang dimiliki oleh swasta menguasai tanah seluas 41,5 juta H. Per Juni 2012 8ribu izin konsesi pertambangan di atas lahan seluas 2.519.415 hektar. Dan tercatat dimana konsesi perkebunan kelapa sawit 29 jt H hanya dikuasai oleh perkebunan besar swasta. Jika dilihat lebih terperinci, sinar mas sebagai perkebunan terbesar di Indonesia telah memiliki konsesi lahan seluas 2 juta hektar, Alas Kusuma grup menguasai 1,5 juta hektar lahan, Salim Grup 1,5 juta hektar dan lainnya yang memonopoli lahan secara besar-besaran.

Legitimasi pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari pemodal telah mewujudkan kemerosotan kehidupan bagi rakyat. Disamping dari memberikan kemudahan izin konsesi penguasaan lahan skala besar terhadap pemodal, perampasan tanah yang masif dilakukan oleh negara dan perkebunan swasta semakin meningkat. Maka yang lahir ialah konflik agraria berkepanjangan. Selama tahun 2020 1.319 kasus konflik agraria. Namun sekali lagi, keberpihakan pemerintah terhadap pemodal dengan sikap represif terhadap kaum tani. Konflik agrarian terus meningkat dengan rakyat di pedesaan yang menjadi korban. Pada tahun 2021 terdapat 1.391 konflik agrarian dan dari tahun 2014-2018 terdapat 41 orang tewas, 566 dianiaya dan 51 orang tertembak. Perampasan tanah tersebut membuat ketimpangan atas tanah semakin menjadi dengan mayoritas keluarga tani rata-rata kepemilikan tanahnya hanya seluas 500m. Serta intimidasi, teror menimpa setiap harinya kaum tani yang tanahnya dirampas

Dan hari ini rezim sedang meng-upayakan pukulan telak bagi rakyat dan karpet merah untuk monopoli yang dilakukan oleh korporasi perkebunan. Yaitu berupa RUU pertanahan. Yang dimana akan menciptakan payung hukum kemudahan pengadaan tanah untuk dimonopoli. Seperti salah satunya izin penguasaan tanah yang dilakukan oleh korporasi selama 90 tahun. Oleh karena itu kita perlu menyadari rakyat terus dipukul oleh kebijakan-kebijakan yang menindas. Dan kemudahan bagi oligarki kapital. Maka perjuangan rakyat tertindaslah suatu kepastian yang harus dilakukan.

➤ **Kelas buruh dalam penghisapan**

Dibawah pemerintahan boneka kelas pemodal. Dengan watak anti rakyat, dijalankankanlah agenda-agenda neolib yang menyengsarakan rakyat. Dengan pembangunan ekonomi yang disandarkan pada investasi dengan orientasi keuntungan sebesar-besarnya bukan untuk mensejahterakan. Maka rakyatlah yang menjadi korban. Terkhusus kelas pekerja sebagai sasaran penghisapan.

Dengan watak pro pemodal. Pemerintah dengan aturan omnibuslaw cipta kerja melalui PP pengupahan no 36 tahun 2021 mengekang hak demokratis buruh dalam menentukan langsung upah setiap tahunnya. Dan juga menciptakan politik upah murah terhadap kelas pekerja. Yang dimana kenaikan upah tidak bersandar pada kebutuhan hidup layak namun bersandar pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi atau kenaikan bahan pokok. Ditambah dengan perhitungan daya beli serta anggota rumah tangga bekerja. Sehingga tidak bakal terjadi kenaikan upah yang mendorong buruh meningkat kehidupannya karena ketika dalam situasi krisis ekonomi saat ini, omnibuslaw cipta kerja melalui PP pengupahan yang baru tidak menolong buruh dari krisis yang dialami saat ini. Melainkan hanya sebatas agar tetap bisa bertahan hidup

Apapun yang diciptakan oleh penguasa akan terus mengorbankan kelas pekerja demi lancarnya akumulasi modal investor. Dengan dilanggengkannya sistem fleksibilitas ketenagakerjaan, berupa sistem outshoring. Dimana kelas pekerja dibawah penyalur tenaga kerja (pihak ketiga) di perdagangkan di pabrik-pabrik dengan upah murah dengan potongan upah yang dilakukan penyalur dan tanpa

kepastian jaminan sosial, keselamatan dll. Sistem ini skema perbudakan zaman modern. Fleksibilitas tak cukup dengan outshoring, sistem kerja waktu tertentu menimpa kelas pekerja. Dengan adanya itu lahirnya suatu ketidakpastian status bagi buruh kontrak, dengan sistem kontrak buruh diposisikan sangat lemah dihadapn pemilik pabrik. Sehingga pengurangan hak-hak buruh dan pemutusan kontrak mudah dilakukan tanpa pesangon. Tak cukup disitu. Sistem pemagangan semakin marak terjadi. dengan porsi pekerjaan yang hampir sama dan upah yang lebih murah maka dibawah rezim pro pemodal kelas pekerja dihadapkan situasi penghisapan upah murah dan ketidakpastian jaminan status dalam fleksibilitas hubungan kerja.

Demi melancarkan investasi. Rezim terus memberikan pukulan-pukulan bagi kelas pekerja. Dengan aturan-aturan yang mempermudah PHK tanpa membebani pengusaha melalui pembayaran pesangon. Demi terciptanya PHK besar-besaran. Menurut data kemenaker, selama masa pandemi terdapat 2,94 juta buruh yang di PHK dan dirumahkan. Dan untuk menunjang itu semua. Pemerintah mengesahkan aturan omnibuslaw cipta kerja beserta pp turunannya untuk melegalkan PHK dan merumahkan buruh tanpa gaji dan melegalkan pemotongan pembayaran upah dengan dalih krisis ekonomi.

Pemuda mahasiswa dalam liberalisasi pendidikan dan masa depan suram

Dari keseluruhan penduduk di indonesia. Usia muda menempatkan posisi sebagai jumlah terbanyak. Dari 35 juta usia kuliah (18-25 thn) yang terserap ke jenjang perguruan tinggi hanya 4,8 juta. Ini tidak lain dari liberalisasi perguruan tinggi yang membuat biaya kuliah semakin mahal. liberalisasi ini lahir dari skema perjanjian internasional yang membelenggu. Melalui WTO, dengan agenda neoliberal maka diubahnya orientasi negara yang tidak lagi berorientasi dalam pemenuhan pendidikan untuk rakyat. Jelas terlihat, setiap tahunnya APBN untuk pendidikan tidak pernah menjadi prioritas anggaran pembangunan. swastanisasi pendidikan tinggi semakin besar dan perguruan tinggi negeri tak ubahnya swasta. Skema otonomi kampus dengan tak lagi mendapatkan subsidi pendidikas untuk pemenuhan pendidikan yang terjangkau dan layak. Menciptakan beban dipikul mahasiswa untuk mengenyam pendidika tinggi

Disamping beban berat liberalisasi pendidikan dengan biaya yang mahal. Ketidakpastian masa depan pemuda akan kerja yang layak semakin tinggi. Di Februari 2021 terdapat 8,75 juta orang pengangguran. Jumlah ini naik dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta. Dan penyumbang terbesar pengangguran dari rentang usia kaum muda yaitu umur 20 - 24 tahun dan dari segi pendidikan lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran yang ada. Hal ini menandakan tidak ada jaminan pasti yang diberikan negara bagi kaum muda untuk melewati masa depannya disamping upah murah dan fleksibilitas ketenagakerjaan yang saat ini terjai

Pandemi, krisis kesehatan, ketimpangan ekonomi dan omnibuslaw cipta kerja

krisis kesehatan berupa pandemi covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 membuat krisis ekonomi semakin parah. pandemi menyebabkan keterlambatan yang sangat parah bagi roda perekonomian, dan rakyat miskin menjadi korban yang terparah dari krisis tersebut. selain terancam dari virus, terancam pula krisis ekonomi dengan PHK massal, lemahnya daya beli serta berkurangnya pendapatan. namun krisis pandemi tersebut tidak terjadi pada kaum kaya, menurut lembaga penelitian Oxfam bahwa pandemi covid mengakibatkan ketimpangan semakin menganga dengan berkurangnya pendapatan kaum miskin dan bertambahnya kekayaan bagi orang kaya. Oxfam mencatat terdapat kenaikan kekayaan para miliarder dunia sebesar 2.707 miliar dollar as. ika harta itu didistribusikan secara merata, maka jumlahnya lebih dari cukup untuk menahan penambahan kemiskinan akibat pandemi. Oxfam memperkirakan biaya untuk mencegah 226 juta orang jatuh di

bawah garis kemiskinan (5,5 dolar AS per hari) sesuai prediksi Bank Dunia hanya berkisar 88 miliar dolar AS. dan terdapat 501 juta orang di dunia terancam jatuh kedalam jurang kemiskinan dan jika ketimpangan kekayaan akibat dari monopoli oleh orang kaya ini tidak terobati maka akan terdapat 3,4 miliar penduduk bumi jatuh kedalam jurang kemiskinan pada tahun 2030 lebih besar dari tahun 2019 sebesar 3,2 miliar penduduk bumi.

Indonesia tidak terlepas dari ketimpangan kekayaan tersebut. rakyat Indonesia menjadi sapi perah bagi lumping kekayaan imperialisme dan oligarki ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Menurut Forbes, kekayaan miliuner tetap meningkat per Desember 2020 dibanding Desember 2019. Hartono Bersaudara, misalnya, kekayaannya bertambah dari 37,7 miliar dolar AS ke 38,8 miliar dolar AS. Sementara Keluarga Widjaja di urutan kedua hartanya naik dari 9,6 miliar dolar AS ke 11,9 miliar dolar AS. Di sisi lain, BPS mencatat rata-rata upah gaji/buruh/karyawan per Agustus 2020 saja sudah turun 5,2 persen, dari Rp2,89 juta ke Rp2,76 juta. pada Maret 2020 kemiskinan sudah bertambah dari 9,22 persen menjadi 9,78 persen, padahal pandemi baru diumumkan pertengahan Maret. Kemiskinan tentu akan semakin menjadi bila memperhitungkan dampak dari lonjakan pengangguran dari 7,1 juta ke 9,77 juta per Agustus 2020 dan terjadi penurunan pendapatan pekerja di Indonesia sebanyak 5,2 persen

watak keberpihakan negara borjuasi semakin terlihat dengan keberpihakannya pada kaum borjuasi internasional maupun nasional yang telah menjadi oligarki di Indonesia. pengesahan undang-undang untuk memuluskan investasi dalam rangka untuk mengobati krisis kapitalisme yang didera imperialisme sebagai bentuk keberpihakan. omnibuslaw cipta kerja bukan memperbaiki kehidupan kaum tani, kelas buruh maupun rakyat miskin lainnya. namun sebaliknya akan memperparah keadaan dikemudian hari, sehingga penghisapan dan ketimpangan kekayaan dikemudian hari akan semakin menjadi.

Indonesia dalam cengkraman imperialisme

Apa itu imperialisme ?. Imperialisme ialah bentuk penjajahan secara ekonomi dan politik di dunia melalui penguasaan rantai produksi yang melahirkan oligarki finance di dunia. Dalam usaha menguatkan penjajahannya, mesti disalurkan dana-dana ke berbagai negara berupa jeratan hutang dan investasi. Sehingga menyebabkan suatu negara tidak memiliki kedaulatan secara ekonomi dan politik.

➤ Indonesia sebagai negara ketergantungan terhadap investasi dan hutang

Indonesia dengan segala kekayaan sumber daya alamnya dan banyaknya jumlah sumber daya manusianya tidak untuk kesejahteraan rakyat. Ketidakmandirian ekonomi indonesia terlihat dari selalu defisitnya anggaran belanja melebihi pendapatan, Mei 2019 defisit menyentuh 127 T. Dan dari keseluruhan pendapatan negara di tahun 2018 sebesar 1,894,7 T sebesar 1,618,1 T berasal dari penerimaan pajak. Artinya indonesia sebagai negara tidak mampu mengelola sumber produksi yang ada di indonesia untuk pendapatan negara. Bukti yang jelas, April 2019, indonesia mengalami defisit perdagangan terdalam sepanjang sejarah sebesar 36 T. Akibatnya ialah nilai mata uang rupiah melemah. Dan kita terjebak dalam negara importir bagi produk luar negeri. Sedangkan ekspor kita yang terbesar hanya bersandar terhadap bahan mentah sumber daya alam, bukan produk jadi.

Konskuensi dari negara yang tidak mandiri secara ekonomi yaitu ketergantungan terhadap investasi. Penanaman modal di indonesia di tahun 2018 tumbuh di angka 765 triliun. Tumbuh 100 triliun dari tahun sebelumnya. Untuk membuka keran sebesar-besarnya, pemerintah memberi kemudahan aturan regulasi, dengan memberikan pengurangan pajak seperti tax amnesty, tax holiday bagi perusahaan besar berinvestasi di indonesia. ketersediaan tanah. Jaminan keamanan. Namun imbas dari

itu semua politik upah murah dan hubungan kerja fleksibel di ciptakan untuk di perdagangkan terhadap kemudahan investor. Juga perampasan tanah kaum tani untuk ketersediaan investor masuk ke Indonesia. Selain itu juga pengerahan aparat TNI, POLRI DLL sebagai alat represifitas bagi rakyat untuk mengamankan lancarnya modal mengalir di Indonesia

Selain bergantung terhadap investasi juga Jeratan hutang yang semakin melilit Indonesia. Per Mei 2019 hutang Indonesia secara keseluruhan sebesar 5.135 triliun. Angka ini lebih tinggi dari pendapatan negara Indonesia. Jeratan hutang ini tidak lain untuk membiayai pembangunan penunjang investasi seperti pembangunan infrastruktur. Juga pembiayaan pengembangan produksi di Indonesia.

Jeratan hutang tersebut ialah suatu bentuk ekspor kapital oleh imperialisme melalui lembaga keuangan dunianya seperti World Bank Group dan IMF. Dan sampai saat ini setiap tahunnya donor hutang terbesar selalu dari World Bank. Untuk menyalurkan krisis yang terjadi dalam tubuh mereka ke seluruh penjuru dunia dengan terciptanya tatanan ekonomi global berbentuk eksploitasi besar-besaran dalam sistem ekonomi kapitalisme. Melalui jeratan hutang tersebutlah imperialisme yang dikomandoi negara-negara US dan negara sekutunya mendikte negara-negara berkembang dan miskin melalui perjanjian hutang, dengan didikte oleh agenda neoliberalisme untuk menciptakan globalisasi ekonomi tanpa proteksi ekonomi oleh negara. Dan hasilnya, tunduknya Indonesia terhadap imperialisme, hancurnya kedaulatan politik Indonesia imbas dari jeratan hutang dan dikte imperialisme

➤ **Neoliberalisme sebagai jalan pembangunan**

Konsekuensi dari cengkaman imperialisme ialah agenda neoliberalisme yang dijalankan terhadap rakyat di Indonesia. Pemerosotan kehidupan bagi rakyat dan ketimpangan adalah sebuah keniscayaan dari dijalankannya agenda neoliberalisme. Kondisi di atas adalah sebuah kenyataan bagi rakyat Indonesia. Secara garis besar Neoliberalisme dijalankan melalui :

Privatisasi : imperialisme melalui agenda neoliberalisme akan menciptakan tatanan yang bersandar terhadap kepemilikan pribadi secara besar-besaran. Segala hal yang sifatnya publik akan di privatisasi. Mulai dari BUMN kena imbas dari liberalisasi yang akhirnya bukan lagi menjadi milik publik/negara

Pencabutan subsidi : agenda neolib akan mengurangi peran negara terhadap pemenuhan hak-hak rakyat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, energi migas, listrik dll. Rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ada pemenuhan tanggung jawab dari negara. Dan anggaran negara di alihkan terhadap sektor pembangunan yang menunjang investasi seperti pembangunan infrastruktur

Deregulasi : dikte imperialisme menciptakan hancurnya kedaulatan politik negara. Demi tercipta perubahan aturan (deregulasi) dari yang mempersulit investasi dirubah untuk melancarkan investasi. Proteksi negara terhadap penanaman modal, pasar dihilangkan. Dan segala hal yang mempersulit investasi akan dihapuskan. Dan hari ini, visi dari presiden terpilih Jokowi menunjukkan watak aslinya sebagai kepanjangan tangan dari terselenggaranya agenda neoliberalisme di Indonesia

Penutup

Nusantara dengan banyaknya kekayaan alam belum bisa mandiri sepenuhnya. Istilah yang dipakai oleh kurikulum dan pelajaran di Pendidikan soal menyoal diplomasi yang membahas jika Kerjasama internasional sangat menguntungkan. Nyatanya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang di lihat di lapangan. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan apa arti dari keluarga

serumpun dan seperjuangan. Keegoisan para kapitalis dan oligarki untuk terus menggeruk dan hasil dari gerukan sumber daya alam tersebut Kembali di eksportir. Yang diuntungkan hanya segelintir orang dan itu hanya orang-orang kaya saja. Maka dari itu, satu serumpun, keluarga dan seperjuangan adalah orang-orang yang memperjuangkan untuk dapat merombak ekonomi politik secara sepenuhnya. Kembali bangun industrialisasi nasional tanpa adanya hubungan dengan negara imperialis.

Referensi

H. Nasution. 1984. *Pokok-Pokok Gerilya*. Bandung: Angkasa